



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Mulia Mini Mall

Kotak Pos 171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

INTAN JAYA HARI INI

Pada kesempatan ini, kami, pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kerap diperdebatkan, jika berbicara tentang kondisi Intan Jaya saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya: kapan Intan Jaya mulai kacau? Ada apa sebenarnya di Intan Jaya? Mengapa kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) terus saja berlanjut?

Awal kekacauan di Intan Jaya

Intan Jaya tergolong sebagai salah satu paling aman di Papua sebelum dimekarkan menjadi kabupaten. Sesudah pemekarannya menjadi kabupaten, mulai muncul sejumlah kekacauan di daerah ini, terutama konflik horizontal karena Pemilikada.

Dalam skala jangka pendek, kekacauan di Intan Jaya dimulai pada bulan September 2020; tepatnya pada saat *Pendeta Yeremias Zanambani* dibunuh (19/09). Sesudahnya, pembunuhan OAP yang dilakukan oleh TNI/POLRI terus berlanjut, misalnya pembunuhan *katelis Agustinus Duwitau* (7/10), pembunuhan *katelis Rufinus Tigau* (25/10), dll. Kekacauan di Intan Jaya, kemudian diperparah lagi dengan terbakarnya seorang pedagang bernama *Ramli* (8/2/21). Sejak saat itulah kondisi Intan Jaya menjadi *Chaos*, tidak kondusif hingga hari ini. Puncak dari seluruh kekacauan ini terjadi pada tanggal 15 Pebruari 2021; hari di kala 3 (tiga) orang kakak-beradik (Janius Bagau, Solaiman Soni Bagau dan Yustinus Bagau) meregang nyawa setelah disiksa dan dianiaya di luar batas kemanusiaan oleh aparat TNI/POLRI.

Dampak dari rentetan tindak kekerasan ini, warga sipil menjadi ketakutan dan memilih untuk mengungsi. Pengungsian gelombang pertama memilih untuk mengungsi ke kabupaten-kabupaten tetangga. Mereka yang mengungsi adalah warga sipil: OAP, non OAP dan ASN. Dari kalangan masyarakat sipil OAP, kami mencatat kurang lebih 1000 kk di kabupaten Nabire. Gelombang-gelombang berikutnya adalah pengungsian yang sifatnya lokal dan aksidental. Artinya, mereka mengungsi ke tempat aman di dalam wilayah Intan Jaya manakala terjadi kekacauan (misalnya mengungsi ke kompleks Gereja Katolik Santo Misael Bilogai).

Sebaliknya, dalam skala jangka panjang; kami berkeyakinan bahwa kekacauan di Intan Jaya tidak bias dilihat sebagai peristiwa yang kejadiannya berdiri sendiri. Kekacauan ini merupakan bagian integral dari sebuah skenario besar yang dirancang oleh Negara. Kami mencatat beberapa peristiwa yang menguatkan keyakinan itu dan menyebutnya sebagai **pra kondisi untuk Intan Jaya**.

1. Pada pertengahan hingga akhir tahun 2019, sudah erhembus isu di Timika bahwa akan ada penyerangan terhadap PT. Freeport Indonesia di wilayah Tembagapura, yang akan dilakukan oleh TPN/OPM. Masyarakat asli dari kampung-kampung di sekitar area Tembagapura dipaksa untuk mengungsi ke Timika.
2. Pada 15 Pebruari 2020, terjadi penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang guru SD Inpres Baluni, Kampung Jagamin, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kejadian ini juga menewaskan *Bharatu Anumerta Doni Priyanto* (anggota BRIMOB). Kapolda Papua, *Irjen. Pol. Paulus Waterpau* menyatakan, bahwa peristiwa dilakukan oleh KKB pimpinan *Gupsi Waker* (Tribunnewa, 12 Maret 2020).



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Mulia Mini Mall

Kotak Pos 171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

3. Tanggal 09 Maret 2020 terjadi penembakan terhadap *Sersan Kepala Anumerta La Ongge*, anggota Koramil 1710-05 Distrik Jila (m.medcom.id)
4. Kapolda Papua *Irjen. Pol. Paulus Waterpau*, juga menyatakan bahwa pihak keamanan berhasil melumpuhkan 4 (empat) anggota KKB serta mengambil senjata mereka (Kompas.com, 17 Maret 2020).
5. Di akhir bulan yang sama (30/3), terjadi penyerangan di Kuala Kencana, Timika oleh KKB pimpinan *Joni Botak*. Penyerangan ini menewaskan *Graeme Thomas Wall* (57), berkebangsaan New Zeland serta melukai *Jibril MA Bahar* (49) dan *Ucok Simanjuntak* (57) yang berkebangsaan Indonesia.
6. Pada tanggal 24 April 2020, terjadi lagi penyerangan oleh KKB pimpinan *Lekagak Telenggen* terhadap pos keamanan di Mile 60 (areal RPU 47) Tembapapura; serta sejumlah kejadian lainnya

Rentetan peristiwa ini hanya mau mengungkapkan kenyataan bahwa Papua berada dalam kekacauan yang dilakukan oleh kelompok separatis, maka penambahan pasukan keamanan dari luar Papua merupakan jawaban yang logis. Selain itu, menunjuk Gupsi Waker (yang dari segi fam berasal dari kabupaten Puncak) sebagai pimpinan KKB di wilayah Intan Jaya dan dalam penyerangan PT Freeport yang adalah Obyek Vital Negara yang harus diburu adalah bagian dari skenario untuk mengacaukan Intan Jaya.

Ada Apa Di Intan Jaya

Sampai hari ini, akses informasi dan telekomunikasi di Intan Jaya tidak berjalan normal. Akses pada jaringan Telkomsel menjadi sangat terbatas. Akibatnya, informasi publik di Intan Jaya dimonopoli oleh pihak otoritas keamanan. Ceritera tentang kondisi aktual Intan Jaya serta kebenarannya hanya bersumber dari pihak keamanan. Yang kita dengar dan baca adalah bahwa *ada baku tembak* antara TNI/POLRI dengan kelompok separatis Papua. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Bisa jadi benar, sebab ada juga korban di pihak TNI/POLRI. Namun, dalam skenario besar rancangan negara, alasan ini kurang mendasar.

Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai utang luar negeri yang tidak sedikit. Menurut catatan Kompas, di akhir tahun 2018, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar US\$ 376,8 miliar (Kompas 15/2/19). Di saat utang itu belum terlunasi, Indonesia sudah berani untuk membeli 51% saham di PT Freeport Indonesia dengan harga mencapai US\$ 3,85 miliar. Dari manakah duit untuk membeli saham semahal itu? Tentu saja didapat dengan cara meminjam alias utang lagi. Kondisi itu masih diperparah dengan habisnya bahan baku emas di *open pit* (area tambang terbuka) serta menurunnya bahan baku yang sama di *underground pit* (area bawah tanah), sebagaimana diungkapkan oleh Dirut PT. Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin (Kompas, 28/9/18). Maka, dengan bertambahnya utang luar negeri tersebut, hampir pasti bahwa Indonesia tidak akan mampu untuk mengembalikannya dalam waktu yang singkat. Kondisi inilah yang memaksa Negara untuk melirik lokasi lain yang disebut sebagai **daerah cadangan B** milik PT. Freeport, yakni **Block Wabu**. Letak geografis dari Block Wabu ini, tepat berada di ibu kota kabupaten Intan Jaya. Jadi, kekacauan di Intan Jaya hampir pasti dipicu oleh **kepentingan bisnis pertambangan dan bukan karena alasan keamanan dan keutuhan negara.**



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Mulia Mini Mall

Kotak Pos 171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

Dampak nyata dari taktik ekonomi yang mengatasnamakan keutuhan negara ini adalah meningkatnya tensi kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil. Selain itu, demi mengaamankan diri, kebanyakan warga sipil memilih untuk meninggalkan kampung halaman dan mengungsi.

Sebab Langgengnya Kekerasan Negara

Pertanyaan mendasar lainnya dalam konteks kekerasan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP) adalah *mengapa langgeng?* Kami mencatat beberapa jawaban berikut:

1. **Diskriminasi Rasial:** Negara Republik Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang didalamnya mengatur juga penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun praksisnya, OAP masih diperlakukan *bukan* sebagai warga negara. Ujuran *monyet* terhadap OAP di berbagai tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia merupakan salah satu bukti konkret. Sayangnya, negara tidak pernah menanggapi secara serius dan menyelesaikannya secara menyeluruh. Negara (seolah-olah) membenarkan dan memelihara ujaran dan tindakan rasial. Imbasnya, pandangan yang diskriminatif lagi rasial tetap berkembang subur dan dihidupi oleh banyak kalangan, lantaran dipelihara oleh ketidakpedulian negara lewat aparaturnya. Lagi, di daerah-daerah konflik bersenjata semisal Intan Jaya, pembunuhan terhadap warga sipil OAP menjadi hal yang wajar.
2. **Alpanya Negara:** Dalam banyak tragedi kemanusiaan di Papua, negara selalu lamban, bahkan tidak hadir untuk memberikan respon yang dibutuhkan. Kalau pun ada perhatian dari pemerintah, itu juga didasarkan pada pandangan diskriminasi rasial tadi. Sebagai contoh, pada bulan September 2019, ujaran rasis diucapkan oleh seorang guru di Wamena yang mengakibatkan wamena membara. Banyak warga non Papua diungsikan oleh pemerintah dengan menyediakan pesawat, penampungan dan bahan makanan. Sebaliknya, ketika warga kabupaten Nduga mengungsi karena kontak senjata antara TNI/POLRI dengan KKB (Desember 2018), pemerintah membisu, tidak melakukan apa-apa; bahkan juga ketika diberitakan bahwa sudah ada puluhan orang yang meninggal dunia dalam pengungsian. Demikian pula dengan Intan Jaya. Sudah 3 (tiga) bulan, belum ada penanganan konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Mengapa? Alasannya hanya satu, yakni pengungsi di Wamena **bukan** Orang Asli Papua sedangkan pengungsi Nduga dan Intan Jaya adalah Orang Asli Papua.
3. **Kegagalan Identifikasi terhadap OAP:** tindak kekerasan negara terhadap OAP tidak hanya terjadi di Intan Jaya. Kasus serupa sudah sering terjadi di seantero Tanah Papua selama puluhan tahun. Alasannyapun sangat klasik: *yang ditembak adalah anggota gerakan separatis yang merongrong kedaulatan negara*. Pokoknya kalau ada OAP yang memakai baju, gelang tangan atau menenteng noken bermotif Bintang Kejora, maka layak untuk ditangkap, diperiksa bahkan dihilangkan. Jika ada orang berkulit hitam dan berambut keriting yang berambut gimbal dengan jenggot panjang, maka layak untuk ditangkap, diperiksa bahkan dihilangkan. Paham seperti inilah yang dihidupi oleh prajurit non organik TNI/POLRI di Tanah Papua. Hanya di Papua, pasukan non organik TNI/POLRI menjadi tidak mampu, bahkan gagal dalam mengidentifikasi OAP. Sebaliknya, coba bandingkan dengan penampilan yang sama di wilayah lain di Indonesia. Apakah orang yang berjenggot panjang selalu diidentikan sebagai anggota teroris oleh aparat TNI/POLRI?



KEUSKUPAN TIMIKA

SEKRETARIAT Keadilan dan Perdamaian

Jl. Cendrawasih No.12, Kompleks Mulia Mini Mall

Kotak Pos 171, Timika, MI 99910

Telp. (0901) 323053, Fax (0901) 323819

Email: timikaskp@yahoo.com

TIMIKA - P A P U A

4. ***Tiadaanya Ruang Sipil:*** sampai hari ini, pembangunan markas ataupun pos TNI/POLRI; baik organik maupun non organik selalu berada di tengah pemukiman warga sipil. Sangat jarang kita menjumpai pos aparat di luar hunian warga sipil. Bagi OAP, kehadiran TNI/POLRI seperti ini selalu dialami sebagai teror. Kapan saja OAP bisa dicurigai, ditangkap, disiksa bahkan dibunuh.
5. ***Mandeknya Pengadilan HAM Ad Hoc:*** hal ini juga harus disebutkan, karena mandeknya proses hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM Berat, tentu mempunyai dampak psikologis bagi aparat keamanan. Dalam semua kasus pelanggaran HAM Berat di Papua, TNI/POLRI selalu diuntungkan oleh negara. Mereka menjadi kelompok yang kebal hukum. Akibatnya, mereka semakin percaya diri untuk bertindak semena-mena, bahkan membunuh warga sipil tanpa harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

Seruan

Setelah melihat dan mengalami seluruh dinamika keamanan di Intan Jaya, kami, pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika menyerukan kepada:

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia lewat kementerian terkait agar segera mengkaji ulang rencana pembukaan pabrik penambangan emas di Intan Jaya, sebab nyatanya mendatangkan penderitaan bagi penduduk lokal daripada membahagiakan.
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangkogabwilhan III, DPRP, MRP harus bertanggungjawab dan memastikan keamanan dan keselamatan warga sipil di Intan Jaya secara nyata.
3. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan TPN/OPM juga harus bertanggungjawab dan memastikan keselamatan warga sipil di Intan Jaya secara nyata.
4. Warga sipil asli Intan Jaya agar tidak meninggalkan kampung halaman, walaupun harga yang harus dibayar terlalu mahal. ***Ingat, sekali kampungmu ditinggalkan kosong, kamu tidak pernah akan kembali.***

Demikian catatan kami

Timika, 08 Maret 2021

Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika